



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULHAIRI
2. Jabatan : KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
3. NHK : 500990

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 888.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/98 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/192 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 23.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SPIN SPIN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 74.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 999.200.000

III. HUTANG Rp. 10.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 988.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.